

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kedaulatan rakyat seperti yang dijelaskan pada undang-undang dasar negara republik indonesia pasal 1 ayat (2) dikatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berkedaulatan rakyat, dari penjelasan ayat tersebut maka negara yang berkedaulatan rakyat ini memiliki sistem pemerintahan demokrasi. Diketahui bahwa negara yang didalam pemerintahannya menganut atau menerapkan sistem demokrasi maka negara tersebut membutuhkan keikutsertaan politik dari penduduk atau warga negaranya. Keikutsertaan politik ini dapat dikatakan sebagai suatu keadaan sedia dari warga negara untuk dapat berperan aktif dan ikut serta dalam kegiatan politik seperti pengambilan keputusan politik. Di negara Indonesia keikutsertaan politik menunjukkan bahwa seluruh elemen manusia baik itu laki-laki dan perempuan diharuskan untuk berperan aktif dalam proses politik di negara Indonesia.

Dalam sebuah proses demokratisasi terutama di negara Indonesia membutuhkan adanya keterwakilan dan partisipasi dari kaum perempuan dalam kegiatan politik, khususnya seperti adanya wakil perempuan dalam lembaga perwakilan rakyat maupun lembaga politik lainnya untuk menjadi wakil perempuan dalam pengambilan keputusan politik bahkan perumusan kebijakan pemerintah (Bintari, 2021:13). Keikutsertaan kaum perempuan

dalam lingkup politik merupakan salah satu perwujudan dalam pemenuhan hak asasi perempuan dalam negara Indonesia. Diketahui bahwa perempuan sebagai sebuah warga negara memiliki hak untuk merubah lebih baik kehidupannya dalam dunia politik, maka dalam hal ini akan membantu perempuan untuk tidak menerima adanya perlakuan diskriminatif dari kalangan manapun. Akan tetapi jika kita lihat pada realitanya yaitu pada lingkup politik masih kerap terjadi yang dilabelkan dengan maskulinitas peran publik (Bintari, 2021:15), maskulinitas peran publik ini dapat dikatakan sebagai sebuah sikap untuk menyediakan atau memberikan porsi yang lebih besar dalam ruang politik atau publik pada kaum laki-laki, sehingga dalam hal ini membuat kaum perempuan tidak atau sulit memiliki porsi yang cukup di dalam dunia politik.

Selama ini politik digambarkan dengan lingkungan atau dunia laki-laki yang rasanya kurang pantas untuk didatangi atau dimasuki oleh kaum perempuan, karena dalam lingkup politik menunjukkan adanya kekuasaan, kesewenangan, pengerahan massa dan perlombaan-perlombaan yang dapat dikatakan ekstrim (Salim, 2019), Sehingga hal ini dianggap sebagai perihal yang tidak melekat atau kerap terjadi di dalam diri perempuan yang dasarnya mengutamakan kehidupan yang damai dan selaras. Berdasarkan kenyataan yang benar terjadi dilapangan keterlibatan perempuan dalam dunia politik merupakan suatu hal yang sulit, jika dilihat implementasi dari UU no. 2 tahun 2008 yang menjelaskan bahwa setiap partai politik harus mengikutsertakan perempuan minimal 30% (persen) dalam setiap

pengurusan ataupun pendiriannya (Kiftiyah, 2019). Perwujudan dari undang-undang tersebut belum terealisasi dengan baik karena dalam nyatanya masih belum terpenuhi, karena dalam pemenuhan kuota partai politik apabila partai politik tersebut tidak dapat memenuhi kuota maka KPU dapat menyatakan partai politik tidak memenuhi syarat dan tidak dapat untuk berkompetensi dalam sebuah pemilihan umum. Realisasi 30% tersebut dikatakan belum terwujud ini dapat dilihat melalui jumlah anggota DPR RI pada periode 2014 sampai dengan 2019 bahwa yang mewakili kaum perempuan dalam perwakilan rakyat ialah hanya 97 orang dimana keseluruhan anggota DPR RI berjumlah 560 orang (Gafur et al., n.d.). Diketahui bahwa dalam partai politik perempuan dikatakan memiliki beberapa kepentingan yang mendasari seperti (Ramdhani, 2021):

- 1) Adanya kepentingan pribadi, dalam hal ini perempuan dasarnya memiliki kepentingan untuk dapat dan bisa merebut adanya posisi strategis dalam internal partai politik contohnya seperti menjadi pengurus, caleg, anggota parlemen, kepala daerah, atau bahkan pada jabatan tertinggi yaitu menjadi calon presiden.
- 2) Adanya kepentingan parpol, dalam hal ini maka perempuan menjadi bagian dalam partai politik memiliki tanggung jawab untuk bisa berkontribusi dalam memenangkan partai yang menaunginya dalam pemilihan umum. Karena diketahui apabila sebuah partai memiliki banyak suara dan memenangkan perolehan suara maka akan berpengaruh terhadap sebuah pemenuhan terutama pemenuhan kepentingan pribadi sebagai diri seorang politisi.
- 3) Adanya kepentingan perempuan itu sendiri, dalam hal ini maka perempuan yang terjun kedalam politik atau berpolitik memiliki kedudukan yang tinggi dan berpengaruh dalam memperjuangkan kepentingan kaum perempuannya melalui jalur politik. Dalam hal ini terkadang perempuan yang berpolitik memiliki posisi yang cukup rumit dimana mereka akan bertaruh dalam kepentingan partai politiknya dan kepentingnya kaum perempuannya.

Keterlibatan perempuan dalam lingkup politik pada dasarnya juga dijelaskan dalam target dan indikator yang terdapat pada tujuan

pembangunan berkelanjutan atau SDGs (*Sustainable Development Goals*) nomor 5 mengenai Kesetaraan Gender yaitu menjamin partisipasi penuh dan afektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan masyarakat dengan memberikan proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat dan pemerintah daerah, serta proporsi perempuan yang berada di posisi managerial (Reagan et al., 2020). Dalam hal ini maka dapat dilihat bahwa Badan Pembangunan Nasional sendiri menilai bahwa keterlibatan perempuan dalam lingkup politik akan membantu keberhasilan dari adanya pembangunan berkelanjutan di negara Indonesia ini. Berdasarkan tujuan dari pembangunan berkelanjutan ini dapat dilihat bahwa terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam dunia politik ialah adanya perlindungan dari penindasan dalam lingkup politik itu sendiri, seperti penyiksaan, perlakuan buruk, penahanan ataupun pemenjaraan yang tidak sah (Dwiastuti, 2022). Diketahui bahwa apabila perempuan kerap merasakan penindasan yang berada dalam lingkup politik ataupun masyarakat luas maka akan membuat perempuan itu sendiri berkurang minatnya untuk bisa terjun ke ranah politik.

Keterbatasan keikutsertaan perempuan dalam dunia politik dapat dilihat dari rendahnya jumlah atau kuantitas kaum perempuan dalam kepengurusan partai politik di dalam berbagai kedudukan dalam hal ini maka perempuan akan menghadapi kondisi yang sulit dalam proses tawar

menawar pada proses pengambilan keputusan di dalam internal partai politik itu sendiri, karena pemikiran yang dikeluarkan oleh perempuan akan berbeda dengan laki-laki sehingga sudah pasti suara terbanyak ada di pihak laki-laki. Selain karena adanya keterbatasan dalam bangku partai politik, rendahnya keikutsertaan perempuan dalam berpolitik juga dapat dilihat melalui adanya motivasi yang rendah dari perempuan itu sendiri hal ini dikarenakan perempuan kurang mendapatkan pendidikan ataupun pengetahuan tentang politik. Apabila perempuan mengalami kekurangan dalam mendapatkan pendidikan politik maka akan mengakibatkan perempuan itu sendiri kurang untuk memiliki motivasi dalam memperjuangkan hak-hak kaum perempuannya pada lembaga pemerintahan seperti lembaga legislatif.

Rendahannya keikutsertaan perempuan dalam dunia politik juga didasari oleh adanya pengaruh budaya patriarki pada penanaman mental perempuan sejak dini (Sulastri, 2020:137). Diketahui bahwasannya sejak usia anak-anak kaum perempuan mendapatkan pemahaman atau pembelajaran gender oleh keluarga dan masyarakat terkait sifat dasar yang harusnya dimiliki oleh kaum perempuan seperti perempuan harus bersifat patuh dan menerima, dalam hal ini maka perempuan kedepannya akan memiliki ketertarikan yang kurang untuk bersaing di lingkungan yang lebih besar.

Faktor utama yang menjadi dasar ketidakikutsertaan kaum perempuan dalam dunia politik ialah kesadaran politik perempuan yang

rendah, dalam hal ini diutamakan terjadi karena perempuan terbiasa untuk bekerja dengan melibatkan perasaan sedangkan kita ketahui bahwa dalam politik penting untuk mengelola pola pikir yang rasional dan juga perempuan mendapatkan latar belakang pendidikan yang rendah dan menimbulkan kemampuan politik yang rendah seperti kurangnya pemahaman terkait pentingnya perempuan berada di dunia politik untuk memperjuangkan hak sesama kaum perempuan, selain itu kurangnya pemahaman terkait isu-isu politik yang terjadi dimana hal ini akan menyebabkan kesulitan kaum perempuan dalam proses pemilihan umum karena kaum perempuan menaruh perhatian lebih untuk memahami calon-calon yang ada dalam pemilihan umum, bahkan asal memilih karena tidak memahami visi dan misi setiap calon yang terpilih. Rendahnya presentasi keikutsertaan perempuan dalam politik dikarenakan rendahnya kesadaran politik dari perempuan itu sendiri dapat dibantu peningkatannya melalui literasi politik.

Kesadaran politik diketahui merupakan hal yang dimiliki oleh setiap warga negara baik perempuan ataupun laki-laki dimana meliputi pengetahuan atau wawasan politik tentang apapun persoalan yang ada didalam politik, kepemimpinan politik ataupun lembaga politik baik secara nasional maupun dalam lingkup internasional. Selain itu kesadaran politik itu sendiri juga merupakan tumbuhnya kesadaran diri seseorang terkait hak dan kewajibannya terhadap negara dalam lingkup politik. Adanya kesadaran politik akan membantu seseorang khususnya kaum perempuan

untuk bisa berpartisipasi lebih dalam berpolitik karena mereka memiliki kemampuan dan pemahaman untuk tidak mudah terhasut atau terpengaruh terkait apapun permasalahan politik yang ada.

Menurut Soekanto (dalam Gafur et al., n.d.), bahwa seseorang dapat dikatakan mempunyai kesadaran politik apabila mereka telah mencapai tahapan indikator dari kesadaran politik itu sendiri seperti mereka memiliki pengetahuan tentang politik, pemahaman politik, memiliki sikap politik dan perilaku politik. Supaya kaum perempuan dapat memiliki kesadaran politik yang tinggi maka diperlukan adanya pengetahuan politik, dimana setelah kaum perempuan memiliki sebuah pengetahuan politik dan diharapkan bagi kaum perempuan untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan politik, sehingga dari adanya pengetahuan serta pemahaman akan menciptakan adanya sikap dan perilaku kaum perempuan yang sadar akan berpolitik.

Diketahui bahwa pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh kaum perempuan terkait politik juga akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh kaum perempuan untuk berpartisipasi atau menunjukkan sikap serta perilakunya dalam politik (Gafur & Patmisari, 2019). Dapat diambil contoh apabila kaum perempuan berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan umum presiden ataupun legislatif, dengan adanya dasar atau bekal pemahaman dan pengetahuan tentang politik maka kaum perempuan dapat menentukan keputusannya berdasarkan kesuaian pemahaman dan pengetahuan mereka terkait calon presiden atau legislatif tersebut. Adanya pengetahuan dan pemahaman akan politik guna meningkatkan kesadaran politik kaum perempuan dapat berhubungan dengan literasi politik.

Literasi politik biasa disebut dengan melek politik, dimana literasi politik memainkan sebuah peran penting dalam meningkatkan kemampuan seseorang untuk lebih memahami informasi politik dan isu-isu politik yang

rumit atau kompleks. Dalam hal ini maka dikatakan bahwa pemilih perempuan yang memiliki literasi politik yang baik dapat mengkaji dan memahami isu-isu yang mempengaruhi mereka secara khusus misalnya seperti adanya sebuah kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak perempuan seperti didalam lingkup pendidikan, sosial, kesehatan dan lainnya. Literasi politik juga dianggap sebagai kesatuan dari sebuah pengetahuan, keterampilan serta sikap seseorang mengenai politik termasuk juga mengenai pemilihan umum (pemilu) (Eka Putri, 2017).

Literasi politik penting dimiliki oleh kaum pemilih perempuan khususnya dalam proses pemilihan umum ialah guna untuk memberikan sebuah pengetahuan, keterampilan dan sikap kaum pemilih perempuan terkait politik sehingga dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum dengan baik. Bagi kaum pemilih perempuan yang pada dasarnya memiliki kekurangan dalam pendidikan politik atau pengetahuannya tentang politik akan melihat arus informasi mengenai politik dalam media secara gamblang karena mereka tidak memiliki dasar yang cukup kuat. Informasi terkait politik yang didapatkan oleh kaum pemilih perempuan melalui sebuah media menjadikan pemilih perempuan untuk merespons terhadap adanya informasi tersebut baik secara positif ataupun negatif, hal ini dapat dikatakan menjadi perihai yang krusial karena arus informasi yang didapatkan oleh pemilih perempuan dapat menyebabkan atau menimbulkan sikap apatis terhadap berbagai prosedur demokrasi, diketahui sikap apatis ini akan menyebabkan kurangnya kesadaran seseorang untuk

berpolitik (Fajar Pratama et al., n.d.). Menurut Heryanto (dalam Fajar Pratama et al., 2022), terdapat 4 (empat) sebuah pendekatan yang dapat dilakukan masyarakat khususnya kaum pemilih perempuan untuk meningkatkan kesadaran politik melalui sebuah literasi politik yaitu: pertama, memahami kebutuhan terhadap informasi politik. Kedua, menempatkan strategi pencarian. Ketiga, adanya gerakan mengkomunikasikan informasi. Keempat, adanya pengevaluasian produk dari proses akhir politik.

Literasi politik terdapat beberapa komponen yang ada didalamnya meliputi: *Pertama-tama*, diperlukan pemahaman dari warga negara mengenai struktur pemerintahan, termasuk lembaga politik, peran partai politik, dan proses pengambilan keputusan politik di suatu negara atau wilayah. *Kedua*, esensial untuk memahami isu-isu politik, seperti masalah dalam kebijakan, perdebatan politik, atau isu politik yang kontroversial. *Ketiga*, dibutuhkan kemampuan dalam menganalisis informasi politik, yang mencakup kemampuan untuk secara kritis menganalisis informasi yang diterima, mengidentifikasi asal atau sumber informasi, membedakan antara fakta dan opini, serta memahami adanya bias politik dalam suatu informasi. *Keempat*, menunjukkan keterampilan partisipasi dalam aktivitas politik, dengan diketahui bahwa literasi politik melibatkan kemampuan individu untuk ikut serta dalam kegiatan politik, seperti pemilihan umum, kampanye politik, atau demonstrasi. Hal ini melibatkan pemahaman terhadap hak dan kewajiban warga negara serta kemampuan untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan politik. *Kelima*, memiliki dan menunjukkan keterampilan komunikasi politik, seperti kemampuan individu untuk berdebat dengan argumen yang masuk akal, mendengarkan pandangan atau opini orang lain, bahkan ikut serta dalam diskusi politik. (Ali Rasyid, 2023).

Kaum pemilih perempuan perlu memiliki literasi politik berupa pengetahuan dan pemahaman akan sebuah dampak dari adanya penyebaran informasi yang luas dimana dengan sebuah cara yaitu memilah antara isu-isu politik mana yang benar dan yang bohong, hal ini ditujukan untuk meningkatkan sebuah kesadaran politik untuk bisa berpartisipasi lebih

banyak dalam lingkup politik selain itu juga untuk membuat kaum pemilih perempuan menjadi lebih efektif dalam menjalankan perannya sebagai seorang warga negara Indonesia.

Penelitian terdahulu yang relevan terkait literasi politik oleh Neneng (2022), mengemukakan hasil dari penelitian yang dilakukan bahwasannya sebelum melakukan politik penting untuk memiliki keterampilan dalam literasi politik, selain itu penelitian sebelumnya ini menunjukkan salah satu peran aktif dari perempuan dalam politik yang dilakukan oleh anggota DPR bernama Fahira Idris, dimana hal ini berkaitan sebagai salah satu variabel penelitian yang akan dilakukan.

Selanjutnya ialah penelitian oleh Fahmi Ali Ramdhani (2021), pada penelitian ini mengemukakan peran dan partisipasi aktif dari perempuan dalam lembaga eksekutif, legislatif ataupun yudikatif itu sendiri harus terus diperjuangkan. Penelitian ini memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi peran perempuan dalam politik tergolong rendah salah satunya yang paling utama ialah peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan pendidikan. Penelitian sebelumnya ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan karena objek penelitiannya sama yaitu perempuan, dimana dalam penelitian yang akan dilakukan objek penelitian ada pada pemilih perempuan (mahasiswi). Selain itu hal yang sama juga ada pada tujuan penelitian yaitu ingin menunjukkan bahwa peran perempuan sangat penting bagi berlangsungnya demokrasi di negara Indonesia.

Penelitian terdahulu yang relevan terakhir ialah penelitian oleh Burhanudin (2021), adapun kesimpulan dari penelitian sebelumnya ini ialah bahwa terdapatnya pengaruh dari variabel X yaitu kesadaran politik terhadap variabel Y yaitu partisipasi politik. Dalam penelitian ini dikatakan bahwa apabila nilai kesadaran politik seseorang ditingkatkan maka akan berpengaruh pada nilai partisipasi politik yang meningkat. Penelitian sebelumnya ini memiliki korelevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada bagian salah satu variabel yaitu kesadaran politik dan terkait beberapa indikator dari kesadaran politik itu sendiri.

Peneliti melakukan survei dengan kuisioner sementara terkait tingkatan kesadaran politik perempuan dikalangan mahasiswa perempuan pada program studi PPKN universitas negeri jakarta sebanyak 17 mahasiswa perempuan. Kesimpulan dari hasil angket yang telah dilakukan ialah sebesar 64,7% atau 11 mahasiswa perempuan menyatakan bahwa mereka tidak nyaman untuk menyuarakan pendapat politik pribadi dalam berbagai forum yang ada. Sebesar 58,8% atau 10 mahasiswa perempuan menyatakan dirinya tidak sering terlibat dalam kegiatan diskusi atau perdebatan politik dengan teman-teman sebaya. Selanjutnya sebesar 47,1% atau 8 mahasiswa perempuan menyatakan bahwa mereka tidak meyakini bahwa suara perempuan akan terdengar dan menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan politik. Terakhir, sebesar 52,9% atau 9 mahasiswa perempuan menyatakan dirinya tidak berminat untuk terjun langsung kedalam dunia politik karena mereka merasa kerap di nomor duakan dengan peran laki-laki

yang besar di lingkup politik. Berdasarkan hasil kuisioner sementara ini maka dikatakan bahwa kesadaran politik perempuan dalam lingkup mahasiswa dapat dikatakan rendah, maka dalam hal ini kemampuan literasi politik dapat berkontribusi dalam kesadaran politik perempuan.

Dalam penelitian yang dilakukan ini, peneliti mengambil sampel beberapa mahasiswa perempuan yang berada di Prodi PPKN Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020, 2021 dan 2022. Dari adanya latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka peneliti akan mengangkat masalah tersebut untuk dijadikan sebagai bahan skripsi dengan judul "Hubungan Literasi Politik dengan Kesadaran Politik Pemilih Perempuan (Studi Kuantitatif Mahasiswa Perempuan PPKN Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta)". Adapun judul penelitian yang diambil oleh peneliti berkaitan dengan payung penelitian dari Prodi PPKN FIS UNJ itu sendiri dalam lingkup pendidikan politik. Batasan umum dalam penelitian yang dilakukan ini ialah untuk melihat adanya hubungan dari literasi politik terhadap peningkatan kesadaran politik pemilih perempuan khususnya pada mahasiswa perempuan Prodi PPKN di Fakultas Ilmu Sosial UNJ angkatan 2020, 2021 dan 2022.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang diatas, maka ditemui adanya beberapa masalah yang teridentifikasi. Adapun permasalahan yang teridentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana keterampilan literasi politik mahasiswa perempuan di PPKN FIS UNJ?
2. Bagaimana kesadaran politik pemilih perempuan di kalangan mahasiswa perempuan di PPKN FIS UNJ?
3. Apakah terdapat hubungan antara keterampilan literasi politik dengan kesadaran politik pemilih perempuan di kalangan mahasiswa perempuan PPKN FIS UNJ?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah diatas penelitian yang akan dilakukan perlu adanya sebuah pembatasan masalah. Pembatasan masalah dalam penelitian ini ialah pada literasi politik yang memiliki tiga komponen pengukuran keterampilan politik yaitu: keterampilan kognitif (*cognitive skill*), keterampilan afektif (*affective skill*) dan keterampilan konatif atau psikomotorik.

Penelitian ini juga melakukan sebuah pembatasan terhadap objek yang akan diteliti yaitu pada pemilih perempuan yang ada pada tingkatan universitas atau mahasiswi. Penelitian ini akan dilakukan pada mahasiswa perempuan di prodi PPKN Fakultas Ilmu Sosial UNJ Angkatan 2020, 2021 dan 2022.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada pembatasan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah, "Apakah terdapat

hubungan antara literasi politik dengan kesadaran politik pemilih perempuan di Prodi PPKN FIS UNJ?”

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretik

Penelitian ini dapat diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi baik secara pengetahuan, teoritis maupun informatif terkait adanya pengaruh dari literasi politik terhadap kesadaran politik pemilih perempuan.

2. Manfaat Praktis

a. Mahasiswi

Kepada mahasiswi, maka penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran politik mahasiswi dalam lingkup universitas ataupun nasional dengan adanya penerapan literasi politik guna membantu mahasiswi lebih aktif dan berani dalam berkegiatan politik.

b. Pemilih perempuan secara umum

Kepada pemilih perempuan secara umum, maka penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran politik kaum pemilih perempuan dalam lingkup nasional dan internasional melalui penerapan literasi politik yang berguna untuk membantu pemilih perempuan lebih menyadari hak dan kewajibannya dalam politik di sebuah negara.

c. Perguruan Tinggi

Kepada perguruan tinggi, maka penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk perguruan tinggi khususnya organisasi-organisasi mahasiswa untuk bisa melakukan sosialisasi atau pembelajaran terkait literasi politik untuk bisa meningkatkan kesadaran mahasiswa/i.

d. Lembaga politik

Kepada lembaga politik, maka penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk lembaga politik atau khususnya partai politik untuk lebih mengutamakan literasi politik sebagai sebuah tujuan utama atas pelaksanaan politiknya melalui pendidikan atau sosialisasi.

